

SUBBAG HUMAS DAN TATA USAHA

BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

| | | |
|-------------------|-------------|-------------------------------------|
| Berita | : Bupati | Kecewa dengan Pemanfaatan Dana Desa |
| Entitas / Cakupan | : Kabupaten | Majalengka |
| Sumber / Hal | : Pikiran | Rakyat/Hal.8 |
| Edisi | : Senin, | 14 Mei 2018 |

Bupati Kecewa dengan Pemanfaatan Dana Desa

MAJALENGKA, (PR).-

Bupati Majalengka mengaku kecewa dengan penggunaan dana desa yang dikucurkan beberapa tahun ini ke seluruh desa. Menurut dia, pemanfaatannya tidak dilakukan maksimal untuk kesejahteraan masyarakat. Hal ini diduga karena aparat desa tidak mengetahui perencanaan anggaran serta misi pembangunan.

Menurut keterangan Bupati Majalengka Sutrisno, Sabtu (12/5/2018) se usai menghadiri Konferensi PWI Majalengka, kondisi seperti itu hampir terjadi di sebagian besar desa di Kabupaten Majalengka. Akibatnya, dana yang cukup besar dari pemerintah pusat dan kabupaten tidak berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Padahal, esensinya dengan kucuran dana tersebut bisa meningkatkan ekonomi masyarakat serta pembangunan infrastruktur di desa.

"Yang terjadi pada pengelolaan dana desa hanya memenuhi syarat pengeluaran uang, sedangkan manfaatnya tidak ada. Yang muncul sekarang, pemanfaatan dana desa ini membuat gapura, membangun gedung BUMDes, tapi semua kosong tidak diisi. Jadi, manfaatnya tidak ada," ujar Sutrisno seperti dikutip wartawan *Kabar Cirebon Tati Purnawati*.

Menurut Sutrisno, pembangunan infrastruktur jalan harus dilakukan. Jika jalan bagus, transportasi akan lancar sehingga distribusi barang lebih mudah dan murah.

"Uang itu harusnya sebagian untuk pemberdayaan ekonomi dan sebagian lagi untuk infrastruktur yang juga mampu mengungkit perekonomian masyarakat. Sekarang sebagian besar desa hanya berupaya mengeluarkan uang tanpa ada manfaatnya untuk rakyat. Desa-desa harus terus dibimbing," kata Sutrisno.

Menurut dia, jika kepala desa atau aparat desa tidak mampu menyalurkan anggaran untuk pemberdayaan masyarakat, keuangan untuk sektor ekonomi sebaiknya dikelola oleh badan usaha milik desa (Bumdes). Kepala Bidang Pembangunan Ekonomi dan Pembangunan Desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka Elon Sukalam menyebutkan, jumlah dana desa tahun 2018 untuk Kabupaten Majalengka mencapai Rp 312 miliar. Dana sudah ada di kas daerah sejak 16 Maret, tetapi sebagian desa belum melakukan pencairan akibat belum membayar pajak dan desa yang diterima tahun 2017 lalu.***